



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

NOMOR **W.15.PAS.PAS.15-OT.01.03- 2766** TAHUN 2023

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
TAHUN 2023

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG,

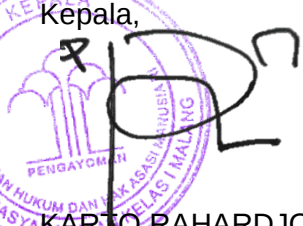
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan diktum kelima Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan penanganan pengaduan dan pengelolaan informasi pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang bertugas untuk :
1. Melakukan Pengelolaan Data Informasi dan Dokumentasi;
 2. Menyiapkan Klasifikasi Informasi Publik sesuai yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggungjawab terhadap informasi yang dihasilkan maupun informasi yang dikecualikan menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 23 Oktober 2023

Kepala,



KARTO RAHARDJO
NIP 19680819 199303 1 001

Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai
Pemasyarakatan Kelas I Malang
Nomor :
Tanggal : 23 Oktober 2023

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
TAHUN 2023**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN
1.	Karto Rahardjo, Bc.IP, S.H., M.H NIP 19680819 199303 1 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Penanggung Jawab
2.	Moh. Zakaria, S.Tr.Pas NIP 19900719 200901 1 002	Penata Muda (III/a)	Ketua
3.	Maya Novia Pramesthi, S.H. NIP 19941109 201712 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Sekretaris
4.	Makruf Rijohan, S.H. NIP 19840316 200604 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Anggota
5.	Moh. Aqim Askhabi, S.Sosio. NIP 19921224 201712 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Anggota
6.	Achmad Sulung Setiawan, S.Sos. NIP 19930102 201712 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Anggota
7.	Anggri Hendarjati, S.H. NIP 19910808 201712 1 002	Penata Muda Tk.(III/b)	Anggota
8.	Dyah Putri Puspitasari, S.Sos. NIP 199407292017122001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Anggota


Kepala
KARTO RAHARDJO
NIP 19680819 199303 1 001



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
NOMOR : W15.PAS.PAS.15-OT.01.03-1268 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA INFORMASI PUBLIK DAN KEHUMASAN
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

- Membaca : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik terhadap penyelenggaraan tugas pokok, fungsi, dan kinerja pemasyarakatan serta sarana publikasi dalam membangun citra positif pemasyarakatan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola Media Informasi Publik dan Kehumasan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
- b. bahwa nama-nama dalam surat keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
6. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial bagi Aparatur Sipil Negara; dan
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor SEK-1.TI.09.01 Tahun 2025 tentang Penguatan Reputasi Positif Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Media Sosial serta Media Konvensional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA INFORMASI PUBLIK PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang tersebut di bawah ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Media Informasi Publik dan Kehumasan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang

Penanggung Jawab : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang
Koordinator : Moh. Zakaria
Sekretaris : Nodya Wuri
Bendahara : Dyah Putri Puspitasari
Anggota : Makruf Rijohan
Anggri Hendarjati
Achmad Sulung Setiawan

Maya Novia Pramesthi
Khoirun Nisak
Dimas Jaya Zakiri
Christian Diza Saputra
Tashya Trianindya

- KEDUA : Tim Pengelola Media Informasi Publik dan Kehumasan memiliki tugas sebagai berikut.
1. membuat pedoman rencana kegiatan, sosialisasi, dan publikasi serta komunikasi kepada masyarakat;
 2. mengelola dan memperbarui informasi pada seluruh saluran komunikasi dan informasi seperti website, sosial media terkait publikasi/sosialisasi masyarakat;
 3. membuat rilis kegiatan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang untuk selanjutnya disebarkan kepada media dan diunggah pada saluran informasi yang tersedia dan/atau menyelenggarakan jumpa pers;
 4. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait kehumasan seperti dokumentasi, liputan, pembuatan berita, fotografi, komunikasi visual/grafis, dan produk komunikasi/ publikasi lainnya;
 5. membangun kerjasama dan hubungan baik dengan media/pers sebagai rekan kerja masyarakat;
 6. membangun citra positif masyarakat dengan memberikan informasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memperhatikan kondisi keamanan, ketertiban umum, serta keadilan sosial;
 7. melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya;
 8. melaporkan setiap kegiatan Tim Pengelola Media Informasi Publik dan Kehumasan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 Maret 2025
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KARTO RAHARDJO

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: W.15.PAS.PAS.15-OT.03.02-254 TAHUN 2024

TENTANG
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG TAHUN 2024

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembangunan zona integritas di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang Tahun 2024;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1360);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan hal-hal yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Kepala Kantor Wilayah.
- KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani meliputi :
1. Manajemen Perubahan
 - a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. Merubah pola pikir dan budaya kerja pada Satuan Kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - c. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
 2. Penataan Tata Laksana
 - a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - c. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
 - a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - c. Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - d. Meningkatkan efektifitas manajemen Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - e. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang.
 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - a. Meningkatkan kinerja di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang
 - b. Meningkatkan akuntabilitas di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang

5. Penguatan Pengawasan
 - a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
 - b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
 - c. Mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas opini laporan keuangan;
 - d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di Balai Pemasarakatan Kelas I Malang;
 - b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di Balai Pemasarakatan Kelas I Malang;
 - c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Balai Pemasarakatan Kelas I Malang.

KEEMPAT : Pembiayaan kegiatan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pemasarakatan Kelas I Malang.

KELIMA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Pemasarakatan Kelas I Malang Tahun 2024 melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 Januari 2024

Kepala Balai Pemasarakatan
Kelas I Malang,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KARTO RAHARDJO
NIP. 196808191993031001



TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG TAHUN 2024

Penanggung Jawab	: Karto Rahardjo, Bc.IP., S.H., M.H.
Ketua Pembangunan ZI	: Suprianto, S.ST.
Sekretaris	: Sofia Andriani, S.H.
Sekretariat	: 1. Nodya Wuri, S.Psi. 2. Ana Ardhillah, S.Psi. 3. Muhammad Jatikusumo, S.H. 4. Farah Dira Irasyanti, A.Ks. 5. Dyah Putri Puspitasari, S.Sos. 6. Dra. Erna Yulianti
Bidang Manajemen Perubahan	
Koordinator	: Enny Umronah, A.Ks. M.H.
Anggota	: 1. Sri Rahayu, S.H. 2. Rinda Susanti, S.Psi. 3. Sucipto, S.H. 4. Moh Zakaria, S.Tr.Pas. 5. Suryono, S.H. 6. Moch Syamsudin Nurhidayanto, S.T, S.Psi, M.H.
Bidang Penataan Tata Laksana	
Koordinator	: Nurul Farida, S.Psi, M.H.
Anggota	: 1. Moh Aqim Askhabi, S.Sosio. 2. Sesari Ningtiyas, S.Sos. 3. Andriyanto, S.H. 4. Bambang Darsono, S.H. 5. Imam Munali, S.ST.
Bidang Penataan Manajemen SDM	
Koordinator	: E Nanik Khrisnawati, A.Ks, M.H.
Anggota	: 1. Esti Agustiningrum, A.Md. 2. Ika Meilina Wulandari, S.H. 3. Fajar Kurnia Haqiqi, S.Sos. 4. Yanuar Adi Prakoso 5. Maya Novia Pramesthi, S.H.
Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
Koordinator	: Nurhana Rosita Ningrum, S.T., M.H.
Anggota	: 1. Erna Widyastuti, S.H. 2. Menik Ambarwati, S.Psi. 3. Dwi Wulan Kartikasari, S.H. 4. Kalimin, S.H, M.H. 5. Yudhianto Hermawan, S.H.

Bidang Penguatan Pengawasan

Koordinator

Anggota

: Gatot Heri Prasetyo, S.H.

: 1. Ramadhan Adi Pradana, S.H.

2. Rr Nining Handayani, S.H.

3. Rani Mahsa Khoirunnisa, S.Psi.

4. Ulan Widi Oktaviani, S.H.

5. Sri Muhartati, S.Sos.

Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator

Anggota

: Imam Wahyudi, S.ST.

: 1. Achmad Sulung Setiawan, S.Sos.

2. Rifqi Samanhudi, S.Kom.

3. Makruf Rijohan, S.H.

4. Triyono Budi Santoso, A.Ks.

5. Anggri Hendarjati, S.H.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 Januari 2024

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KARTO RAHARDJO

NIP 196808191993031001





KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: WP.15.PAS.PAS.15-OT.03.02-1580 TAHUN 2025

TENTANG
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG TAHUN 2025

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembangunan zona integritas di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Ketua Pembangunan Zona Integritas yang baru melalui surat keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1360);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan hal-hal yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Kepala Kantor Wilayah.
- KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani meliputi :
1. Manajemen Perubahan
 - a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. Merubah pola pikir dan budaya kerja pada Satuan Kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - c. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
 2. Penataan Tata Laksana
 - a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - c. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
 - a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - c. Meningkatnya disiplin Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - d. Meningkatnya efektifitas manajemen Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - e. Meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang.
 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - a. Meningkatnya kinerja di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang
 - b. Meningkatnya akuntabilitas di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang
 5. Penguatan Pengawasan
 - a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
 - b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
 - c. Mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas opini laporan keuangan;
 - d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.
 6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang.

- KEEMPAT : Pembiayaan kegiatan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pemasarakatan Kelas I Malang.
- KELIMA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Pemasarakatan Kelas I Malang Tahun 2025 melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 Januari 2025



Kepala Balai Pemasarakatan
Kelas I Malang,

Karto Rahardjo

Lampiran Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan
Kelas I Malang
Nomor : WP.15.PAS.PAS.15.OT.03.02-1580 Tahun
2025
Tanggal : 20 Januari 2025

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG TAHUN 2025**

Penanggung Jawab	: Karto Rahardjo, Bc.IP., S.H., M.H.
Ketua Pembangunan ZI	: Makruf Rijohan, S.H.
Sekretaris	: Sofia Andriani, S.H.
Sekretariat	: 1. Nodya Wuri, S.Psi. 2. Ana Ardhillah, S.Psi. 3. Muhammad Jatikusumo, S.H. 4. Farah Dira Irasyanti, A.Ks. 5. Dyah Putri Puspitasari, S.Sos. 6. Dra. Erna Yulianti
Bidang Manajemen Perubahan	
Koordinator	: Enny Umronah, A.Ks. M.H.
Anggota	: 1. Sri Rahayu, S.H. 2. Rinda Susanti, S.Psi. 3. Sucipto, S.H. 4. Moh Zakaria, S.Tr.Pas. 5. Suryono, S.H. 6. Moch Syamsudin Nurhidayanto, S.T, S.Psi, M.H.
Bidang Penataan Tata Laksana	
Koordinator	: Nurul Farida, S.Psi, M.H.
Anggota	: 1. Moh Aqim Askhabi, S.Sosio. 2. Sesari Ningtiyas, S.Sos. 3. Andriyanto, S.H. 4. Bambang Darsono, S.H. 5. Imam Munali, S.ST.
Bidang Penataan Manajemen SDM	
Koordinator	: E Nanik Khrisnawati, A.Ks, M.H.
Anggota	: 1. Esti Agustiningrum, A.Md. 2. Ika Meilina Wulandari, S.H. 3. Fajar Kurnia Haqiqi, S.Sos. 4. Yanuar Adi Prakoso 5. Maya Novia Pramesthi, S.H.
Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
Koordinator	: Nurhana Rosita Ningrum, S.T., M.H.
Anggota	: 1. Erna Widyastuti, S.H. 2. Menik Ambarwati, S.Psi. 3. Dwi Wulan Kartikasari, S.H. 4. Kalimin, S.H, M.H. 5. Yudhianto Hermawan, S.H.

Bidang Penguatan Pengawasan

Koordinator

: Gatot Heri Prasetyo, S.H.

Anggota

- : 1. Ramadhan Adi Pradana, S.H.
2. Rr Nining Handayani, S.H.
3. Rani Mahsa Khoirunnisa, S.Psi.
4. Ulan Widi Oktaviani, S.H.
5. Sri Muhartati, S.Sos.

Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator

: Imam Wahyudi, S.ST.

Anggota

- : 1. Achmad Sulung Setiawan, S.Sos.
2. Rifqi Samanhudi, S.Kom.
3. Makruf Rijohan, S.H.
4. Triyono Budi Santoso, A.Ks.
5. Anggri Hendarjati, S.H.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 Januari 2025

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang,



Karto Rahardjo



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere - Depok 16512

Telepon (021) 7540125 Faksimili (021) 7540125

Laman : www.bpsdm.kemenkumham.go.id, surel : bpsdm@kemenkumham.go.id

Nomor : SDM.2-SM.02.03-798 11 Agustus 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Pelatihan Reformasi Birokrasi Metode *e-Learning* Angkatan XIX - XXII Tahun Anggaran 2022

Yth. Daftar Nama Terlampir
di tempat

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SDM-158.SM.02.03 Tahun 2022 sampai dengan Nomor SDM-161.SM.02.03 Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Penetapan Peserta Pelatihan Reformasi Birokrasi Metode *e-Learning* Angkatan XIX sampai dengan Angkatan XXII, dimohon perkenannya untuk menugaskan pegawai sebagaimana dalam daftar terlampir untuk mengikuti Pelatihan Reformasi Birokrasi Metode *e-Learning* selama 6 (enam) hari kerja tanggal 19 Agustus 2022 – 26 Agustus 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **Peserta tidak sedang atau dalam proses hukuman disiplin;**
2. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan login pada hari dan waktu yang telah ditentukan dalam jadwal (jadwal terlampir);
3. **Peserta yang bersedia mengikuti pelatihan wajib melakukan registrasi secara online melalui <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/e-registrasi> paling lambat Rabu, 17 Agustus 2022 (Login menggunakan NIP tanpa spasi);**
4. Dokumen yang diupload saat melakukan registrasi adalah foto menggunakan jas/blazer hitam berlatar belakang merah, lembar konfirmasi dan surat tugas yang ditandatangani oleh atasan berwenang;
5. **Bagi peserta yang tidak bersedia mengikuti pelatihan wajib mengunggah surat pernyataan tidak bersedia disertai alasan yang ditandatangani dan diketahui pejabat berwenang melalui <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/e-registrasi> paling lambat Rabu, 17 Agustus 2022 (Login menggunakan NIP tanpa spasi);**
6. Pelatihan dengan metode *e-Learning* merupakan kegiatan pelatihan jarak jauh yang menggunakan Aplikasi *e-Learning* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga peserta tidak diperlukan kehadirannya di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mengikuti kegiatan pelatihan dengan metode *e-Learning* dengan membuka <http://e-learning.kemenkumham.go.id> (Nama Pengguna adalah NIP dan password adalah P@55word, setelah Login mohon segera melakukan *update profile* peserta dengan mencantumkan alamat e-mail peserta yang aktif);
7. Setelah login dan sebelum memulai pembelajaran, pelajari terlebih dahulu Panduan Aplikasi *e-Learning*, mengunduh jadwal kegiatan dan materi pelatihan;
8. Informasi dan konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Tim *e-Learning* Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum dan HAM:

Pengelola Aplikasi (Admin) dan Login	: Ari Fauzi (085228050126);
Pemanggilan dan Konfirmasi Peserta	: Mutiara (081806750659);
Jadwal Pembelajaran	: Hade Yusuf (085376731128);
Ujian dan Hasil Kelulusan	: Anindita (081316571530), Dede (08111399623).

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
Teknis dan Kepemimpinan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Eko Budianto

NIP 197311161993031001



Tembusan :

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lampiran I

Surat Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
Teknis dan Kepemimpinan

Nomor : SDM.2-SM.02.03-798

Tanggal : 11 Agustus 2022

Daftar Tujuan Surat

1. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang – Undangan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
8. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional;
10. Direktur Politeknik Imigrasi;
11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara;
12. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu;
13. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau;
14. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung;
15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten;
16. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta;
17. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat;
18. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
19. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur;
20. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat;
21. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali;
22. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara;
23. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan.

an. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
Teknis dan Kepemimpinan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Eko Budianto

NIP 197311161993031001

Lampiran II
Surat Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
Teknis dan Kepemimpinan
Nomor : SDM.2-SM.02.03-798
Tanggal : 11 Agustus 2022

Jadwal Pelatihan Reformasi Birokrasi Metode e-Learning
Angkatan XIX – XXII Tahun Anggaran 2022

No.	Hari / Tanggal	Waktu	Materi Pelatihan	JP	Ket.
1.	Jumat, 19 Agustus 2022	08.00 – 16.00	- Log in - Pre Test - Download Materi	-	Online
2.	Sabtu, 20 Agustus 2022	-	Libur	-	-
3.	Minggu, 21 Agustus 2022	-	Libur	-	-
4.	Senin, 22 Agustus 2022	08.00 – 10.00	Hakikat Reformasi Birokrasi	3	Online
		10.00 – 13.00	Belajar Mandiri	3	Offline
		13.00 – 14.00	Survei Evaluasi Tenaga Pengajar + Ujian	1	Online
5.	Selasa, 23 Agustus 2022	08.00 – 10.00	Roadmap Reformasi dan Birokrasi	3	Online
		10.00 – 13.00	Belajar Mandiri	3	Offline
		13.00 – 14.00	Survei Evaluasi Tenaga Pengajar + Ujian	1	Online
6.	Rabu, 24 Agustus 2022	08.00 – 10.00	Manajemen Perubahan	3	Online
		10.00 – 13.00	Belajar Mandiri	3	Offline
		13.00 – 14.00	Survei Evaluasi Tenaga Pengajar + Ujian	1	Online
7.	Kamis, 25 Agustus 2022	08.00 – 10.00	Etika dan Manajemen Kinerja	3	Online
		10.00 – 13.00	Belajar Mandiri	3	Offline
		13.00 – 14.00	Survei Evaluasi Tenaga Pengajar + Ujian	1	Online
8.	Jumat, 26 Agustus 2022	08.00 – 16.00	- Evaluasi Penyelenggaraan - Post Test	-	Online

- Keterangan :
- 1. Waktu yang tercantum di dalam jadwal merupakan Waktu Indonesia Barat (WIB);
 - 2. Bagi peserta pelatihan diharapkan menyesuaikan dengan Waktu Indonesia Barat (WIB).

an. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
Teknis dan Kepemimpinan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Eko Budianto
NIP 197311161993031001

Daftar Nama Peserta
Pelatihan Reformasi Birokrasi Metode *e-Learning* Angkatan XIX
Tahun Anggaran 2022

No	Nama	NIP	Jabatan	Kantor Wilayah/Unit Kerja
1	Tenisia Agustin, S.Tr.Pas	199908062022012001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
2	Winda Rizkidawati, S.Tr.Pas	199712042022012001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
3	Moh. Zakaria, S.Tr.Pas	199612122022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
4	Adhika Yovaldi Salas, S.Tr.Pas	199904202022011002	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
5	Harfa Sina Atmaji, S.Tr.Pas	199611222022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
6	Gusatar Marza, S.Tr.Pas	199908132022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
7	Josua Ignatius Manik, S.Tr.Pas	199709092022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
8	M. Tera aprilian raka putra, S.Tr.Pas	199604232022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
9	Aulia Shirly, S.Tr.Pas	199812242022012001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
10	Muhammad Fahri, S.Tr.Pas	199512112022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
11	Hanif Budi Nugroho, S.Tr.Pas	199811072022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
12	Adipta Yudha Wardana, S.Tr.Pas	199910232022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
13	Kenny Rico Octavian Minna, S.Tr.Pas	199910122022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
14	Alfonsius Sinabang, S.Tr.Pas	199507152022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
15	Bastanta Sena Patria Surbakti, S.Tr.Pas	199812042022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
16	Muhamad Reza Pathi Buwana, S.Tr.Pas	199902012022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
17	Jhody Raehandi Ramadhan, S.Tr.Pas	199912212022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
18	Anjas Bhekti Pratama, S.Tr.Pas	199711262022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
19	Reyvandi Guzel, S.Tr.Pas	199504222022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
20	Taufiqurrahman, S.Tr.Pas	199906152022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
21	Yorram Widyatama, S.Tr.Pas	199907282022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
22	Abdullah Muhaimin Hanafi, S.Tr.Im.	199803052022011001	Pengelola Data Keimigrasi	Ditjen Imigrasi
23	Adelia Rabilatun, S.Tr.Im.	199906242022011001	Pegelola Data Keimigrasian	Politeknik Imigrasi

24. Ahmad Pram Prayogo Pangestu...

No	Nama	NIP	Jabatan	Kantor Wilayah/Unit Kerja
24	Ahmad Pram Prayogo Pangestu, S.Tr.Im.	199905222022011003	Pengelola Data Keimigrasian	Ditjen Imigrasi
25	Depriyan Dermawan, S.Tr.Im.	199704282022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong	Kalimantan Barat
26	Derry Darmawan, S.Tr.Im.	199812132022012001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat	DKI Jakarta
27	Deswando Ramarainza Tarigan, S.Tr.Im.	199912262022011002	Pengelola Data Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan	Sumatera Utara
28	Dimas Chandra Pamungkas, S.Tr.Im.	199908282022011001	Pengelola Data Keimigrasian	Ditjen Imigrasi
29	Fadhil Atallah Dwiputro, S.Tr.Im.	199907252022011002	Pengelola Data Keimigrasian	Ditjen Imigrasi
30	Faqim Adinul Falah, S.Tr.Im.	199901302022011002	Pengelola Data Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	Jawa Timur
31	Fauzan Chairunizar Sobari, S.Tr.Im.	199611042022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang	Banten
32	Firman Wahyu Fachreza, S.Tr.Im.	199711282022011001	Pengelola Data Keimigrasian	Ditjen Imigrasi
33	Frissilya Angelina, S.Tr.Im.	199804182022011001	Pengelola Data Keimigrasian	Politeknik Imigrasi
34	Hendhi Alfian Zanitra, S.Tr.Im.	199511202022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon	Jawa Barat
35	Herlis Fahmil Qur`ani, S.Tr.Im.	199708302022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur	DKI Jakarta
36	Jea Ferico Wijaya, S.Tr.Im.	199602172022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	Sumatera Utara
37	Joshua Anggie Bobby, S.Tr.Im.	199804012022011002	Pengelola Data Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	Jawa Tengah
38	Jovanka Sepa Mahyolan, S.Tr.Im.	199910202022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya	Jawa Barat
39	Justine Mariana Filitzia Waso, S.Tr.Im.	199910032022012001	Pengelola Data Keimigrasi	Ditjen Imigrasi
40	Muhammad Agung Perdana, S.Tr.Im.	199508202022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang	Jawa Barat

an. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
Teknis dan Kepemimpinan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Eko Budianto

NIP 197311161993031001

Daftar Nama Peserta
Pelatihan Reformasi Birokrasi Metode *e-Learning* Angkatan XX
Tahun Anggaran 2022

No	Nama	NIP	Jabatan	Kantor Wilayah/Unit Kerja
1	Muhammad Fadhil Thalib, S.Tr.Im.	199910222022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	Kepulauan Riau
2	Muhammad Fahmi Pamungkas Daenglala, S.Tr.Im.	199703052022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang	Banten
3	Muhammad Hafidz Maulana, S.Tr.Im.	200008012022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta	DKI Jakarta
4	Muhammad Muqtadir Drajad Lokanasaputra, S.Tr.Im.	199811032022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	Sulawesi Selatan
5	Muhammad Naufal Salsabil, S.Tr.Im.	199903022022011002	Pengelola Data Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara	DKI Jakarta
6	Muhammad Rif'at Fauzan, S.Tr.Im.	199903202022011001	Pengelola Data Keimigrasian	Ditjen Imigrasi
7	Muhammad Rizki Sulistian, S.Tr.Im.	199804072022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai	Bali
8	Muhammad Wildan Bayu Fahrizal, S.Tr.Im.	199810132022011001	Pengelola Data Keimigrasian	Ditjen Imigrasi
9	Nico Harmono Putra, S.Tr.Im.	199612122022011002	Pengelola Data Keimigrasian	Ditjen Imigrasi
10	Nilam Rizky Anugerah, S.Tr.Im.	199801152022011001	Pengelola Data Keimigrasian	Politeknik Imigrasi
11	Olivia Bianca Chintya Bellisima, S.Tr.Im.	199905062022012001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat	DKI Jakarta
12	Putu Maha Permana Aditya, S.Tr.Im.	200001172022011003	Pengelola Data Keimigrasian	Ditjen Imigrasi
13	Rama Parasu, S.Tr.Im.	199805022022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta	DKI Jakarta
14	Rangga Kusmawan, S.Tr.Im.	199907162022011002	Pengelola Data Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo	Jawa Tengah
15	Wahyu Rama Putra, S.Tr.Im.	199805092022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung	Jawa Barat
16	Wahyu Wilaryanto, S.Tr.Im.	199701052022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak	Jawa Timur
17	Yoga Wiranatakusuma, S.Tr.Im.	199809302022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai	Bali
18	Muhammad Anrialdo Pratama, S.Tr.Im.	199906142022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kanim Kelas I Non TPI Jakarta Pusat	DKI Jakarta
19	Rio Erikson Sinurat, S.Tr.Im.	199807172022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kanim Kelas I TPI Jakarta Utara	DKI Jakarta
20	Dhifany Sahira Harahap, S.Tr.Im.	200002032022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kanim Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta	DKI Jakarta
21	Fadillah Hartadi, S.Tr.Im.	199705212022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kanim Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta	DKI Jakarta
22	Muhammad Dafa Assidqi, S.Tr.Im.	199906082022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kanim Kelas I TPI Cirebon	Jawa Barat

No	Nama	NIP	Jabatan	Kantor Wilayah/Unit Kerja
23	Putu Andika Kusuma Wijaya, S.Tr.Im.	200001132022011002	Pengelola Data Keimigrasian Kanim Kelas I Khusus TPI Surabaya	Jawa Timur
24	Dimas Budi Utomo, S.Tr.Im.	199808242022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kanim Kelas I TPI Tanjung Perak	Jawa Timur
25	Kevin Alfredo, S.Tr.Im.	200002032022011002	Pengelola Data Keimigrasian pada Kanim Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai	Bali
26	Difa Astrio Winardi, S.Tr.Im.	199711302022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kanim Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai	Bali
27	Adam Calvin Janewa, S.Tr.Im.	199810242022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kanim Kelas I TPI Denpasar	Bali
28	Andhika Ramawardana, S.Tr.Im.	199812252022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kanim Kelas II TPI Singaraja	Bali
29	Henryco Antarestyan, S.Tr.Im.	199810102022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kanim Kelas II TPI Singkawang	Kalimantan Barat
30	Revorman Eli Mendrofa, S.Tr.Im.	199906132022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kanim Kelas II TPI Pematang Siantar	Sumatera Utara
31	Bisma Braharjanto, S.Tr.Im.	199802062022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kanim Kelas I Khusus TPI Batam	Kepulauan Riau
32	Nanda Horas Pranata, S.Tr.Im.	199510132022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kanim Kelas I Khusus TPI Batam	Kepulauan Riau
33	Andi Lala, S.Tr.Im.	199908142022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kanim Kelas II TPI Pare-Pare	Sulawesi Selatan
34	Syariffudin, S.Tr.Im.	199704072022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kanim Kelas II Non TPI Tobelo	Sulawesi Utara
35	Dian Syahputra Lubis, S.Tr.Im.	199702222022011001	Pengelola Data Keimigrasian pada Kanim Kelas I TPI Manado	Sulawesi Utara
36	M. Fahrul rozi, S.Tr.Pas	199604292022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasarakatan
37	Muhammad Khemal Andhika, S.Tr.Pas	199902082022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasarakatan
38	Octavia Indah Listiarini, S.Tr.Pas	199510152022012001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasarakatan
39	Prihambodo Dwi Prasongko, S.Tr.Pas	199705102022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasarakatan
40	Ricky Utomo Simargolang, S.Tr.Pas	199809142022011002	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasarakatan

an. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
Teknis dan Kepemimpinan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Eko Budianto
NIP 197311161993031001

Daftar Nama Peserta
Pelatihan Reformasi Birokrasi Metode *e-Learning* Angkatan XXI
Tahun Anggaran 2022

No	Nama	NIP	Jabatan	Kantor Wilayah/Unit Kerja
1	Adi Pratama Saputra, S.Tr.Pas	199906072022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
2	Agitya Arya Septiawan, S.Tr.Pas	199809232022011002	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
3	Bobby Lukita Hasibuan, S.Tr.Pas	199712052022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
4	Christian Budi Antoni Sitepu, S.Tr.Pas	199603062022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
5	Dimas Darmawan, S.Tr.Pas	199909282022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
6	Elang Suryandaru, S.Tr.Pas	199908032022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
7	Fajar Agung Nugraha, S.Tr.Pas	199805182022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
8	Virga Indrawan, S.Tr.Pas	199809162022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
9	Muhammad Fahrul Syahputera, S.Tr.Pas	199905222022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
10	Reza Syahrizal, S.Tr.Pas	199806012022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
11	Sanggam Putra Saktiagara, S.Tr.Pas	199712092022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
12	Khusain Cahyono, S.Tr.Pas	199911212022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Ditjen Pemasyarakatan
13	Nindya Noviani, S.H	199811112022032003	Penyuluh Hukum Pertama	Jawa Barat
14	Ahmmad Sofyan, S.Sos.	199604022022031005	Analisis Anggaran Pertama	Balitbang Hukum dan HAM
15	Andri Setiawan, S.H.	199809162022031004	Analisis Hukum Pertama	Balitbang Hukum dan HAM
16	Imam Mahdi Nashif, S.Kom.	199809142022031002	Pranata Komputer Pertama	Balitbang Hukum dan HAM
17	Dr. Elaine Ariadne Lase	199311112022032003	Dokter Pertama pada Rutan Kelas IIB Pandeglang	Banten
18	Dr. Sonnya Gischa De Haan	199305012022032001	Dokter Pertama pada Rutan Kelas I Tangerang	Banten
19	Haswanda Imawan, S.Kom	199608022022031005	Pranata Komputer Pertama	Banten
20	Astrini Adeswari, S.Kom	199612012022032007	Pranata Komputer Pertama	Bengkulu
21	Dian Lusi Zulianti, S.H	198706282022032001	Penyuluh Hukum Pertama	Bengkulu
22	Akbar Syailendra Adi Buwono, S.H.	199606262022031009	Analisis Hukum Pertama	Biro Kepegawaian
23	Cyntia Dwi Lestari, S.E.,	199803202022032008	Analisis Anggaran Pertama	Biro Kepegawaian
24	Deshinta Vellatania Ardi, S.Ap.	199910112022032006	Analisis Anggaran Pertama	Biro Kepegawaian

No	Nama	NIP	Jabatan	Kantor Wilayah/Unit Kerja
25	Ekki Rizki Ramadhan, S.Kom	199901142022031002	Pranata Komputer Pertama	Biro Kepegawaian
26	Alfansya Achmad Mulyadi, S.Kom	200002092022031002	Pranata Komputer Pertama	BPHN
27	Ari Rezki Ginting, S.T.	199806132022031001	Pranata Komputer Pertama	Ditjen AHU
28	Agus Priyanto, S.E.	199308112022031005	Analisis Anggaran Pertama	Ditjen Imigrasi
29	Chico Setyo Asmoro, S.H.	199109032022031006	Analisis Hukum Pertama	Ditjen Imigrasi
30	Dwi Fitriani, S.T	199901272022032002	Pranata Komputer Pertama	Ditjen Imigrasi
31	Agung Harish Bastoro, S.H.	199407152022031004	Analisis Hukum Pertama	Ditjen KI
32	Arif Rachman, S.T.	199412262022031002	Pranata Komputer Pertama	Ditjen KI
33	Indana Nadya Zulva, S.H.	199706082022032011	Analisis Hukum Pertama	Ditjen Pemasyarakatan
34	Debby Osriwany Hutaeruk, S.Kom	198904032022032003	Pranata Komputer Pertama	Ditjen PP
35	Alex Imanuel, S.H.	199806192022031004	Penyuluh Hukum Pertama	DKI Jakarta

an. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
Teknis dan Kepemimpinan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Eko Budianto

NIP 197311161993031001

Lampiran VI
Surat Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
Teknis dan Kepemimpinan
Nomor : SDM.2-SM.02.03-798
Tanggal : 11 Agustus 2022

Daftar Nama Peserta
Pelatihan Reformasi Birokrasi Metode *e-Learning* Angkatan XXII
Tahun Anggaran 2022

No	Nama	NIP	Jabatan	Kantor Wilayah/Unit Kerja
1	Adhi Herlambang, S.A.P	199108252022031004	Analis Anggaran Pertama	Inspektorat Jenderal
2	Ida Bagus Mahayoga Raharja, S.H.	199907152022031004	Analis Hukum Pertama	Inspektorat Jenderal
3	Adyastuti Fitria Damayanti, S.I.Kom	199503042022032006	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Bapas Kelas II Subang	Jawa Barat
4	Baretha Mega Saraswati, S.Psi	199506272022032006	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Bapas Kelas II Subang	Jawa Barat
5	dr. Atikah Fauziayuningtias	199503212022032003	Dokter Pertama pada Lapas Kelas IIB Garut	Jawa Barat
6	dr. Mela Agustini	199408282022032002	Dokter Pertama pada Lapas Kelas IIB Banjar	Jawa Barat
7	Edy Kristian, S,H	199005112022031003	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Bapas Kelas II Subang	Jawa Barat
8	Evana Christi Primanita, S.Psi.	199709022022032003	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Bapas Kelas II Subang	Jawa Barat
9	Ahmad Syampoerna Habibi, S.H	199010282022031001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Bapas Kelas II Kotabumi	Lampung
10	Andi Winata, S.Sos	199005062022031003	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Bapas Kelas II Kotabumi	Lampung
11	Dr. Ocsi Zara Zettira, S.Ked	199610162022032008	Dokter Pertama pada Rutan Kelas IIB Menggala	Lampung
12	Farid Anfasa, S.H	199308022022031003	Penyuluh Hukum Pertama	Lampung
13	Heryani Christie Panjaitan, S.Psi.	199512092022032005	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Bapas Kelas II Kotabumi	Lampung
14	Missi Yura Fadhlani, S.A.P.	199804052022032004	Analis Anggaran Pertama	Banten
15	Nabilah Nur Annisa, S.H.	199509142022032001	Penyuluh Hukum Pertama	Banten
16	Jayanti Umadani, S.E.	199004102022032003	Analis Anggaran Pertama	Bengkulu
17	Indra Danang Prasetyo, S.E.	199804122022031009	Analis Anggaran Pertama	Biro Kepegawaian
18	Muh. Fadhil Al-Haaq Ginoga, S.Komp	199806182022031003	Pranata Komputer Pertama	Biro Kepegawaian
19	Puteri Akmalia, S.E.	199507282022032012	Analis Anggaran Pertama	Biro Kepegawaian
20	T. Putra Safrul Huda, S.Kom	199710202022031003	Pranata Komputer Pertama	Biro Kepegawaian
21	Muh. Khomsin Nurul Hidayah, S.Ak.	199506152022031005	Analis Anggaran Pertama	BPHN
22	Sri Indah Haura'Nisa, S.H.	199910152022032004	Analis Hukum Pertama	BPHN

No	Nama	NIP	Jabatan	Kantor Wilayah/Unit Kerja
23	Nurman Riyadi Rahman, S.A.	199704042022031006	Analisis Anggaran Pertama	Ditjen AHU
24	Rafael Kunto Narpati, S.H.	199811242022031004	Analisis Hukum Pertama	Ditjen AHU
25	Risa Wulandari, S.E.	198906022022032003	Analisis Anggaran Pertama	Ditjen Imigrasi
26	Wina Wulandari, S.H	198712052022032002	Analisis Anggaran Pertama	Ditjen KI
27	Julianto Adri Saputro, S.Kom	198907182022031002	Pranata Komputer Pertama	Ditjen PAS
28	Muhammad Hadi Santoso, S.Ak	199601052022031007	Analisis Anggaran Pertama	Ditjen PAS
29	Orin Sabrina Pane, S.H	199905302022032005	Analisis Hukum Pertama	Ditjen PP
30	Puji Kurniawati, S.Ak.	199701012022032010	Analisis Anggaran Pertama	Ditjen PP
31	Risma Nur Majida, S.I.P.	199602252022032009	Analisis Anggaran Pertama	DKI Jakarta
32	Zaidal Bustomi, S.Kom.	199809012022031001	Pranata Komputer Pertama	Inspektorat Jenderal
33	Lega Valentine Hutabarat, S.Sos.	199802142022031004	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Bapas Kelas II Subang	Jawa Barat
34	Manda Supriati, S.Psi.	199307102022032003	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Bapas Kelas II Subang	Jawa Barat

an. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
Teknis dan Kepemimpinan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Eko Budianto

NIP 197311161993031001

LEMBAR KONFIRMASI / DATA PESERTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2022

Nama Lengkap (Gelar) :
NIP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Telepon / Fax (Kantor) :
Telepon / HP (Peserta) :
No. Surat Pemanggilan :
Email Peserta :

Dengan ini menyatakan **bersedia** sebagai peserta Pelatihan Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2022, serta akan mentaati semua ketentuan yang ditetapkan oleh BPSDM Hukum dan HAM.

....., 2022

.....
NIP

- Catatan :
- Lembar Konfirmasi ini merupakan dokumen BPSDM Hukum dan HAM;
 - Data dalam Lembar Konfirmasi ini sekaligus digunakan dalam proses registrasi peserta Pelatihan;
 - Mohon untuk tidak mengubah bentuk formulir ini;
 - Isilah data secara lengkap dan teliti;

SURAT PERNYATAAN

Nama Lengkap (Gelar) :
NIP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Telepon / Fax (Kantor) :
Telepon / HP (Peserta) :
No. Surat Pemanggilan :

Dengan ini menyatakan **tidak bersedia** sebagai Peserta Pelatihan Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2022 dengan alasan

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak lain.

Mengetahui
Atasan,

....., 2022

Yang Menyatakan,

.....
NIP

.....
NIP



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Jl. Veteran No.11 Jakarta Pusat
Telepon / Fax : (021) 34832101
Email : kepegawaian.ditjenpas@gmail.com

SURAT PERINTAH
NOMOR PAS.1.KP.04.01- 2080

- Menimbang : a. bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melaksanakan kegiatan Pelatihan Reformasi Birokrasi Metode e-Learning Angkatan XIX – XXII Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud pada poin a, pegawai yang namanya tersebut dalam surat tugas ini dipandang cakap dan mampu untuk ditugaskan dalam kegiatan dimaksud;
c. bahwa untuk pelaksanaannya dipandang perlu menerbitkan surat perintah.
- Dasar : Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SDM.2-SM.02.03-798 tanggal 11 Agustus 2022 perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Reformasi Birokrasi Metode *e-Learning* Angkatan XIX – XXII Tahun Anggaran 2022.

MEMERINTAHKAN :

- Kepada : Daftar Nama Terlampir
- Untuk : 1. Sebagai Peserta Pelatihan Reformasi Birokrasi Metode e-Learning Angkatan XIX – XXII Tahun Anggaran 2022;
2. Yang bersangkutan dibebaskan dari tugas pekerjaan sehari-hari selama 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 26 Agustus 2022; dan
3. Melaporkan kepada atasan langsung sebelum melaksanakan surat perintah ini.

Demikian Surat Perintah ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Jakarta, 12 Agustus 2021
Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Yuwono
NIP 19650605 198811 1 001

Tembusan :
Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Lampiran I
Nomor : PAS1.KP.04.01- 2080
Tanggal: 12 Agustus 2022

**Daftar Nama Peserta
Pelatihan Reformasi Birokrasi Metode e-Learning Angkatan XIX
Tahun Anggaran 2022**

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Tenisia Agustin, S.Tr.Pas	199908062022012001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
2	Winda Rizkidawati, S.Tr.Pas	199712042022012001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
3	Moh. Zakaria, S.Tr.Pas	199612122022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
4	Adhika Yovaldi Salas, S.Tr.Pas	199904202022011002	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
5	Harfa Sina Atmaji, S.Tr.Pas	199611222022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
6	Gusatar Marza, S.Tr.Pas	199908132022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
7	Josua Ignatius Manik, S.Tr.Pas	199709092022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
8	M. Tera aprilian raka putra, S.Tr.Pas	199604232022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
9	Aulia Shirley, S.Tr.Pas	199812242022012001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
10	Muhammad Fahri, S.Tr.Pas	199512112022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
11	Hanif Budi Nugroho, S.Tr.Pas	199811072022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
12	Adipta Yudha Wardana, S.Tr.Pas	199910232022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
13	Kenny Rico Octavian Minna, S.Tr.Pas	199910122022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
14	Alfonsius Sinabang, S.Tr.Pas	199507152022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
15	Bastanta Sena Patria Surbakti, S.Tr.Pas	199812042022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
16	Muhamad Reza Pathi Buwana, S.Tr.Pas	199902012022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
17	Jhody Raehandi Ramadhan, S.Tr.Pas	199912212022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
18	Anjas Bhekti Pratama, S.Tr.Pas	199711262022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
19	Reyvandi Guzel, S.Tr.Pas	199504222022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
20	Taufiqurrahman, S.Tr.Pas	199906152022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
21	Yorram Widyatama, S.Tr.Pas	199907282022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban



Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Yuwono
NIP 19650605 198811 1 001

Lampiran II
Nomor : PAS1.KP.04.01- 2080
Tanggal: 12 Agustus 2022

**Daftar Nama Peserta
Pelatihan Reformasi Birokrasi Metode e-Learning Angkatan XX
Tahun Anggaran 2022**

No	Nama	NIP	Jabatan
1	M. Fahrul rozi, S.Tr.Pas	199604292022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
2	Muhammad Khemal Andhika, S.Tr.Pas	199902082022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
3	Octavia Indah Listiarini, S.Tr.Pas	199510152022012001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
4	Prihambodo Dwi Prasongko, S.Tr.Pas	199705102022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
5	Ricky Utomo Simargolang, S.Tr.Pas	199809142022011002	Pengelola Keamanan danKetertiban



Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasarakatan



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Henri Yuwono
NIP 19650605 198811 1 001

Lampiran III
Nomor : PAS1.KP.04.01- 2080
Tanggal: 12 Agustus 2022

**Daftar Nama Peserta
Pelatihan Reformasi Birokrasi Metode e-Learning Angkatan XXI
Tahun Anggaran 2022**

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Adi Pratama Saputra, S.Tr.Pas	199906072022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
2	Agitya Arya Septiawan, S.Tr.Pas	199809232022011002	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
3	Bobby Lukita Hasibuan, S.Tr.Pas	199712052022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
4	Christian Budi Antoni Sitepu, S.Tr.Pas	199603062022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
5	Dimas Darmawan, S.Tr.Pas	199909282022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
6	Elang Suryandaru, S.Tr.Pas	199908032022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
7	Fajar Agung Nugraha, S.Tr.Pas	199805182022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
8	Virga Indrawan, S.Tr.Pas	199809162022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
9	Muhammad Fahrul Syahputera, S.Tr.Pas	199905222022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
10	Reza Syahrizal, S.Tr.Pas	199806012022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
11	Sanggam Putra Saktiagara, S.Tr.Pas	199712092022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
12	Khusain Cahyono, S.Tr.Pas	199911212022011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
13	Indana Nadya Zulva, S.H.	199706082022032011	Analisis Hukum Pertama



Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Yuwono
NIP 19650605 198811 1 001

Lampiran IV
Nomor : PAS1.KP.04.01- 2080
Tanggal: 12 Agustus 2022

**Daftar Nama Peserta
Pelatihan Reformasi Birokrasi Metode e-Learning Angkatan XXII
Tahun Anggaran 2022**

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Julianto Adri Saputro, S.Kom	198907182022031002	Pranata Komputer Pertama
2	Muhammad Hadi Santoso, S.Ak	199601052022031007	Analisis Anggaran Pertama



Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasarakatan



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Yuwono
NIP 19650605 198811 1 001



SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

Nomor: 00027345/LATSAR CPNS III/3004/017/LAN-KEMENKUMHAM/2022

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan yang berlaku menerangkan bahwa:



Nama	: Moh. Zakaria, S.Tr.Pas.
Nomor Identitas	: 199612122022011001
Tempat, Tanggal Lahir	: Pamekasan, 12 Desember 1996
Pangkat/Golongan Ruang	: Penata Muda, III/A
Jabatan	: Pembimbing Kemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Instansi	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kualifikasi	: MEMUASKAN
Judul Aktualisasi	: OPTIMALISASI PEMANTAUAN KESEHATAN NARAPIDANA MELALUI PAPAN KONTROL KESEHATAN (PANTAU SEHAT) DI LAPAS KELAS IIA PASIR PUTIH NUSAKAMBANGAN

telah memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XII Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM dari tanggal 18 Mei sampai dengan 26 Agustus 2022 di Depok selama 511 (lima ratus sebelas) Jam Pelajaran.

DEPOK, 20 SEPTEMBER 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala BPSDM Hukum dan HAM

Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M.
NIP.196611191986031001



**Dokumen ini ditandatangani dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sesuai UU ITE Pasal 11, tandatangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah*

KOMPETENSI, MATA PELATIHAN DAN KEGIATAN

KOMPETENSI

- I. Menunjukkan sikap perilaku bela negara
- II. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya
- III. Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- IV. Menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas

MATA PELATIHAN DAN KEGIATAN

- I. **Sikap Perilaku Bela Negara**
 - 1. Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara
 - 2. Analisis Isu Kontemporer
 - 3. Kesiapsiagaan Bela Negara
- II. **Nilai-Nilai Dasar PNS**
 - 1. Berorientasi Pelayanan
 - 2. Akuntabel
 - 3. Kompeten
 - 4. Harmonis
 - 5. Loyal
 - 6. Adaptif
 - 7. Kolaboratif
- III. **Kedudukan dan Peran PNS untuk Mendukung Terwujudnya *Smart Governance* sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
 - 1. Manajemen ASN
 - 2. *Smart* ASN
- IV. **Habitulasi**
 - 1. Konsepsi Aktualisasi
 - 2. Penjelasan Aktualisasi
 - 3. Pembimbingan Rancangan Aktualisasi
 - 4. Evaluasi Rancangan Aktualisasi
 - 5. Pembekalan Habitulasi
 - 6. Aktualisasi di Tempat Kerja
 - 7. Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi
- V. **Orientasi**
 - 1. *Overview* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS
 - 2. Dinamika Kelompok
 - 3. Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur dan Nilai-Nilai ASN
 - 4. Muatan Teknis Substansi Lembaga
 - 5. *Review* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan
- VI. **Evaluasi Pembelajaran**
 - 1. Evaluasi Sikap Perilaku
 - 2. Evaluasi Akademik
 - 3. Evaluasi Aktualisasi
 - 4. Evaluasi Penguatan Kompetensi Bidang Tugas





PIAGAM PENGHARGAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Moh. Zakaria, S.Tr.Pas.
NIP : 199612122022011001
Tempat, Tanggal Lahir : Pamekasan, 12 Desember 1996
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/A)
Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan
Instansi : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

telah menyelesaikan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XII Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dari tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan 26 Agustus 2022 di Depok dengan Predikat **Memuaskan, Peringkat II (Dua)**.

Depok, 26 Agustus 2022
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Dr. ASEP KURNIA, S.H., M.M.
NIP 196611191986031001



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA DKI JAKARTA**

SERTIFIKAT

Moh. Zakaria, S.Tr.Pas

SEBAGAI PESERTA

Kegiatan Sosialisasi Hasil Penelitian Balitbang Hukum dan HAM di Kantor Wilayah
melalui diskusi daring OPini dengan tema “Implementasi Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan
Melalui Jalur Mediasi” yang diselenggarakan pada 28 April 2021

Jakarta, 28 April 2021

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta




Drs. Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si
NIP. 19660328 198811 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
BAPAS KELAS I MALANG



Workshop & Sosialisasi →

Bapas Malang Hadiri Diseminasi Layanan
Crasi Berbasis Elektronik



bapasmalang.kemenkumham.go.id





Malang – Bapas Malang Kanwil Kemenkumham
jatim turut serta dalam Diseminasi Peraturan
Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2023
tentang Layanan Grasi Berbasis Elektronik yang
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum di Hotel Mercure
Mirama Malang.





Dalam kegiatan ini, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan. Selanjutnya, disampaikan materi mengenai Permenkumham Nomor 26 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Permenkumham Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi dan Praktik Penggunaan Layanan Grasi Berbasis Elektronik yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.



Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, khususnya petugas Pemasyarakatan, terkait implementasi layanan grasi secara elektronik.





Karto Rahardjo, Kepala Bapas Malang, menyampaikan pentingnya mengikuti kegiatan ini. "Diseminasi ini sangat bermanfaat bagi kami, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan memahami tata cara pengajuan grasi secara elektronik, kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisien kepada para pemohon grasi," ujarnya.